



Pengalihan Anggaran untuk Covid-19 Aman Secara Hukum

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) AL Leysandri mengikuti telekonferensi bersama Kemendagri RI yang membahas tentang akuntabilitas anggaran penyelenggaraan barang dan jasa dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Kalbar, Rabu (8/4). Rapat ini dilaksanakan untuk memastikan keamanan dari aspek hukum berkenaan dengan pergeseran

anggaran serta pengelolaan keuangan daerah termasuk pengadaan barang dan jasa selama penanggulangan Covid-19.

"Ternyata yang kami wanti-wanti terkait dengan pengadaan barang jasa ternyata diberikan kelonggaran bagi daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Semua berprinsip akan mendorong Pemerintah Daerah untuk gerak cepat," katanya.

Diharapkan dengan persa-

maan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Meski demikian, Leysandri mengatakan masih ada persoalan regulasi yang harus disiapkan oleh Kemendagri untuk daerah-daerah dalam tata kelola pengelolaan keuangan.

Karena saat ini yang dibahas hanya bagaimana menggeser untuk memanfaatkan anggaran. "Tetapi dari aspek perlindungan tentang kebijakan ini belum ada dan mudah-mudahan tindakan yang dilakukan daerah tidak dijadikan persoalan hukum," harapnya.

Dalam rapat yang juga diikuti Ketua KPK, BPKP, LKPP, Bareskrim dan BPK ini diharapkan bisa menjadi semangat untuk bergerak cepat dalam



ANGGARAN :

Sekda Kalbar AL Leysandri memimpin rapat telekonferensi bersama Kemendagri terkait akuntabilitas anggaran penyelenggaraan barang dan jasa dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Kalbar, Rabu (8/4).

BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

penanganan Covid-19 di daerah. Adanya keraguan dari aspek pertanggung jawaban setelah penanganan di daerah juga diharapkan bisa tuntas.

"Dengan adanya statmen-statmen yang bisa mendorong supaya pergeseran anggaran dan pemanfaatan anggaran ini tidak bisa dipi-

danakan menjadi suatu hal yang baik, hanya dengan catatan tidak ada niat dan hanya (soal) administrasi," jelasnya. *(bar/r)*